

RENCANA AKSI 2024

**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN
HUKUM LHK WILAYAH KALIMANTAN**



KATA PENGANTAR

Rencana Aksi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK (Balai Gakkum) Wilayah Kalimantan tahun 2024 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan dalam waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Rencana Aksi ini memuat perencanaan dan prognosis per Triwulan di Tahun 2024 lingkup Program Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK di dalam melaksanakan berbagai tugas yang diembankan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan yang berlandaskan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2024, dengan hasil sesuai rencana yang diharapkan dan secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien.

Dengan Rencana Aksi ini diharapkan adanya optimalisasi peran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan di dalam peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pada tahun-tahun selanjutnya.

Kepala Balai,
Samarinda, 15 Januari 2024



David Muhammad, S.Sos.,M.H.

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Aksi (Renaksi) Tahunan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai Gakkum) Wilayah Kalimantan Tahun 2024 adalah dokumen yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan yang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Rencana Aksi Penetapan Kinerja TA 2024 adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan. Tujuan dari Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan implementasi kegiatan lingkup Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana aksi ini menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan.

B. LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan kegiatan Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2022 Tanggal 26 Juli 2022 tentang Organisasi dan kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK adalah sebagai berikut:

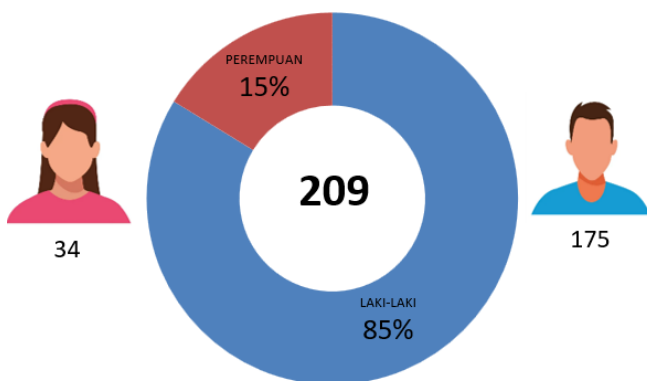


Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Gakkum Kalimantan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan memiliki sumber daya manusia, adapun sumber daya manusia yang dimiliki tahun 2023 adalah sebagai berikut:

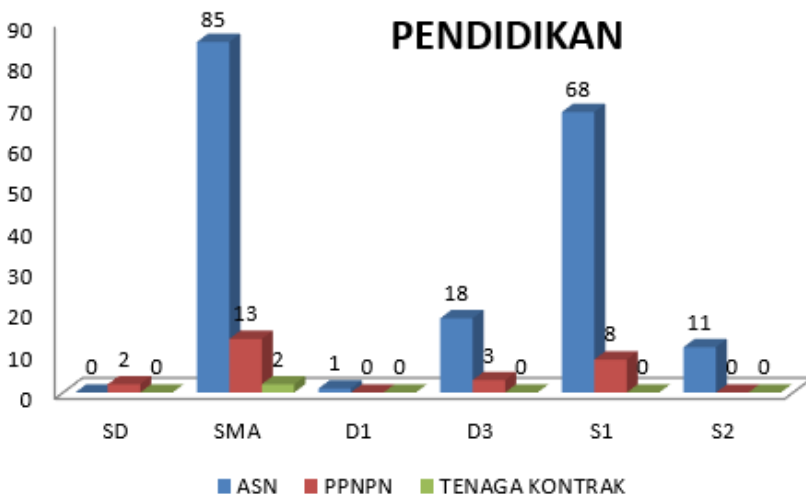
Data Terpilah Sumber Daya Manusia Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan. Data SDM Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan per 31 Desember 2023 berjumlah 209 orang yang terdiri dari 183 ASN, 24 PPNPN dan 2 Tenaga Kontrak, dengan komposisi pemilahan data berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan usia seperti tabel dibawah ini:

JENIS KELAMIN

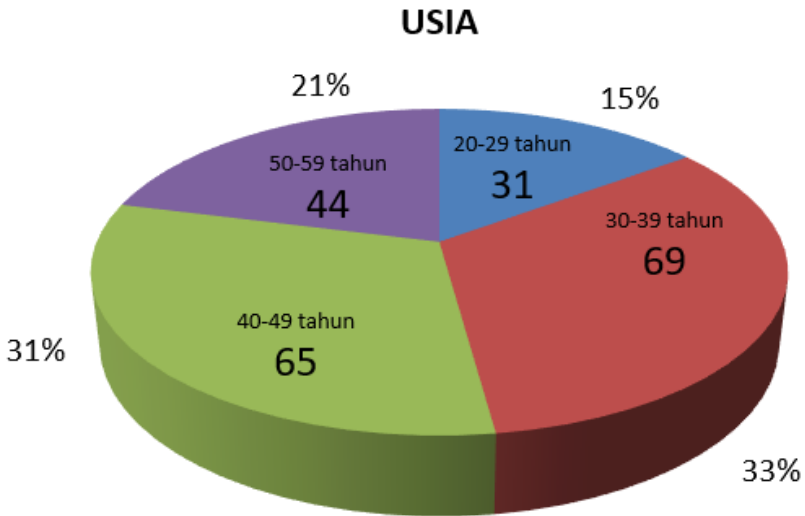


Gambar 2. Data Terpilah berdasar jenis kelamin

PENDIDIKAN



Gambar 3. Data Terpilah berdasarkan pendidikan



Gambar 4. Data Terpilah berdasarkan usia

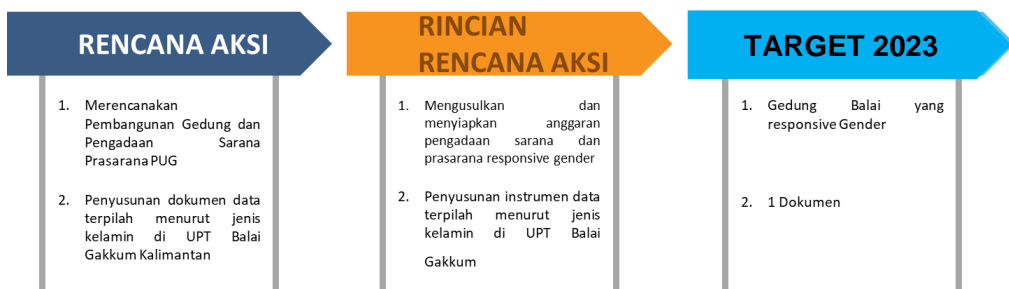
D. PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan, dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan semua pihak dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dan pembangunan.

Komitmen Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan terhadap pencapaian PUG lebih lanjut diterjemahkan melalui Roadmap Pengarusutamaan Gender Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan yang mengacu pada Roadmap Rencana Aksi Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2024

Ditjen Gakkum LHK Nomor P.2/PHLHK/Setjen/SET.1/5/2020 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kelembagaan PUG menjadi salah satu instrumen yang dibutuhkan dalam implementasi PUG yang ditandai dengan adanya kelompok kerja (POKJA), *Gender focal point* dan *Gender Champion* di Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan.

Komitmen Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan di tahun 2024 terhadap pencapaian PUG lebih lanjut diterjemahkan melalui Road Map Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan, sebagai berikut :



Gambar 5. Road Map Balai Gakkum Kalimantan Tahun 2024

BAB II

RENCANA AKSI

Sesuai dengan perjanjian kerja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan TA 2024, telah disampaikan bahwa kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan adalah tersedianya instrumen dan regulasi untuk mendukung kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh unit pelaksana teknis Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan. Hal ini dapat dilihat dari Indikator Kinerja Balai Gakkum Kalimantan yang merupakan bagian dari sasaran program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tabel berikut:

Table 1. Target Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2024 | Satuan | Anggaran (Rp) |
|---|---|-------------|-------------|---------------|
| Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan | Jumlah Operasi Pengamanan Hutan dan penindakan kerusakan lingkungan hidup | 20 | Operasi | 6.675.140.000 |
| | Jumlah Operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar | 12 | Operasi | 4.157.457.000 |
| | Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya | 15 | Orang | 200.000.000 |
| Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan | Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Perundang-undangan | 130 | Badan Usaha | 4.205.620.000 |

| | | | | |
|--|--|-------|---------|----------------|
| perundang-undangan bidang LHK | Bidang LHK | | | |
| Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai P-21 | Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21/ berkas perkara dinyatakan lengkap | 40 | Perkara | 9.562.840.000 |
| Meningkatnya perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan | Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup Yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan | 2 | Perkara | 580.000.000 |
| Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Ditjen Gakkum LHK | Nilai Kinerja Anggaran (NKA) | 93.89 | Poin | 41.031.177.000 |

BAB III PENUTUP

Tercapainya indikator kerja kegiatan Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan didukung oleh kontribusi penuh dari para pelaksana di unit pelaksana teknis lingkup Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan. Oleh karena itu, rencana aksi ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana di lingkungan Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan serta semua pemangku kepentingan dalam upaya penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan akibat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana aksi ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pengembangan sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan, dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi. Dengan disusunnya rencana aksi ini dapat mendorong penyelenggaraan program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan lingkup Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai sasaran program yang sebaik-baiknya. Upaya yang dilakukan dengan dedikasi, kerja keras dan bersungguh-sungguh serta dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat diharapkan agar tujuan program maupun kementerian secara menyeluruh dapat tercapai.

BAB IV
LAMPIRAN-LAMPIRAN

TABEL 1 Matriks Rencana Aksi Triwulanan Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2024;

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Kegiatan | Kegiatan Pendukung | | Anggaran/Pagu (Rp) | Satuan Output/ Komponen | Target Output/ Komponen | Target Output Triwulan | | | | |
|-----|--|--|---|---|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------|------|-------|---|
| | | | | KRO | RO | | | | B03 | B06 | B09 | B12 | |
| | | | | (5) | (6) | | | | (10) | (11) | (12) | (13) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | |
| 1. | Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK | Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK | Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi | Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha | Badan usaha yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan | 4.205.620.000 | Badan Usaha | 130 | 8 | 42 | 42 | 38 | |
| 2. | Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21 | Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap | Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Penanganan Perkara | Kasus Tindak Pidana LHK P21 | 9.562.840.000 | Perkara | 40 | 3 | 12 | 14 | 11 | |
| 3. | Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan | Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan kerusakan lingkungan hidup | Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam | Operasi Pengamanan Kawasan Hutan | 11.032.597.000 | Operasi | 20 | 4 | 5 | 6 | 5 | |
| | | Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar | | | | | | | Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya | | | | | | | | | | | |
| 4. | Meningkatnya perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan | Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan | Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup | Penanganan Perkara | Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani | 580.000.000 | Perkara | 2 | - | - | - | 2 | |
| 5. | Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien Ditjen Gakkum LHK | Nilai Kinerja Anggaran (NKA) | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Layanan Dukungan Manajemen Internal | Layanan Umum | 41.031.177.000 | Poin | 93.89 | 50 | 65 | 80 | 93.89 | |
| | | | | | Layanan Perkantoran | | | | | | | | |
| | | | | Layanan Sarana dan Prasarana Internal | Layanan Sarana Internal | | | | | | | | |

Samarinda, 15 Januari 2024
Kepala Balai,



David Muhammad, S.Sos., M.H.
NIP. 19730707 200003 1 001

TABEL 2 Matriks Rencana Aksi Bulanan Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2024;

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Kegiatan | Kegiatan Pendukung | | Anggaran/Pagu (Rp) | Satuan Output | Target Output | Target Output Bulanan | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|--|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---|
| | | | | KRO | RO | | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | |
| 1. | Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK | Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK | Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi | Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha | Badan usaha yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan | 4.205.620.000 | Badan Usaha | 130 | - | - | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | |
| 2. | Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21 | Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap | Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Penanganan Perkara | Kasus Tindak Pidana LHK P21 | 9.562.840.000 | Perkara | 40 | - | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
| 3. | Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan | Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan kerusakan lingkungan hidup Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya | Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam | Operasi Pengamanan Kawasan Hutan | 11.032.597.000 | Operasi | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | | | | | Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal | | Operasi | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | Polisi Kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya | | Orang | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Meningkatnya perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan | Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan | Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup | Penanganan Perkara | Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani | 580.000.000 | Perkara | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 5. | Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien Ditjen Gakkum LHK | Nilai Kinerja Anggaran (NKA) | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Layanan Dukungan Manajemen | Layanan Umum | 41.031.177.000 | Poin | 93.89 | 15 | 30 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 93.89 | |
| | | | | Layanan Manajemen Internal | Layanan Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Layanan Sarana dan Prasarana Internal | Layanan Sarana Internal | | | | | | | | | | | | | | | | |

Samarinda, 15 Januari 2024
Kepala Balai

David Muhammad, S.Sos., M.H.
NIP. 19730707 200003 1 001

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK
Wilayah Kalimantan



2024